

Enggan Setop PTM 100 Persen, KPAI Sayangkan Sikap Pemprov DKI

JAKARTA (IM) - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti menyalahkan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tak kunjung menghentikan proses pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di tengah temuan kasus Covid-19 di sekolah. Retno berujar, tak semestinya Pemprov DKI mengendurkan angka temuan Covid-19 di sekolah. Menurut Retno, temuan 19 kasus Covid-19 di 15 sekolah di Jakarta tidak bisa dibilang sedikit karena ini berkaitan dengan keselamatan siswa.

"Tadi menyebutkan 'kan baru sedikit, 15 dari hampir 11.000 (sekolah)'. Sebenarnya kalau ngomongin keselamatan anak-anak nggak bisa bilang statistik kayak gitu," ucap Retno saat dihubungi melalui telepon, Senin (17/1).

Retno mengatakan, kasus Covid-19 yang ditemukan di sekolah yang menggelar PTM terus bertambah. Penyebaran Covid-19 akan sulit dihentikan jika pemerintah tak segera mengambil langkah tegas.

Sebagai informasi, per 16 Januari 2022, sebanyak 16 siswa dan 3 guru di 15 sekolah di Jakarta terkonfirmasi Covid-19.

"Sekolah yang terkonfirmasi angkanya naik terus, ini bisa jadi meluas karena sifat dari virus ini (mudah menyebar)," tutur Retno.

Retno meminta agar Pemprov DKI Jakarta bisa

melakukan evaluasi terlebih dahulu terkait pelaksanaan PTM 100 persen pasca penemuan kasus positif Covid-19 di sekolah.

Evaluasi penting dilakukan agar penyebaran tidak kembali terulang pada sekolah lainnya. "Begitu ada kasus itu dipelajari, dievaluasi bolongnya di mana," ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, belum ada urgensi terkait penghentian PTM 100 persen meskipun ditemukan belasan kasus Covid-19 di sekolah. "Belum ada urgensi menutup sekolah PTM. Kami masih terus memantau memastikan semua berjalan lebih baik lagi," kata Riza, Kamis (13/1).

Riza menyebut, jumlah sekolah yang ditemukan kasus Covid-19 di dalamnya tidak lebih 0,1 persen dari jumlah sekolah yang ada di Jakarta.

Selain itu, kata Riza, DKI Jakarta memenuhi syarat untuk menggelar PTM sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang penyelenggaraan PTM. SKB tersebut mengatur bahwa daerah yang menerapkan PPKM Level 1 dan 2 bisa melangsungkan PTM 100 persen. Jakarta saat ini berstatus PPKM Level 2. "Kalau kami tutup nanti orang protes, masa memenuhi syarat untuk PTM 100 persen tapi (malah) ditutup," ucap dia. ● yan

Operasi Minyak Goreng di Johar Baru, Warga Keluhkan Kuota Pembelian

JAKARTA (IM) - Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Sudin PPKUKM) Kota Jakarta Pusat menggelar operasi pasar minyak goreng murah selang Rp14 ribu/ liter di wilayah Kecamatan Johar Baru, Senin (17/1).

Operasi pasar digelar dengan tujuan menekan tingginya harga minyak goreng di pasaran yang mencapai Rp20 ribu-Rp25 ribu/ liter.

Kepala Seksi Sudin PPKUKM Jakarta Pusat, Vicky Suryawan mengatakan, dengan dilakukannya operasi pasar diharapkan dapat sedikit meringankan beban warga, khususnya Jakarta Pusat.

"Mudah-mudahan operasi pasar murah bakal terus ada, apalagi kan harga minyak goreng di pasar sekarang lagi mahal. Tapi Insya Allah, kita akan upayakan harga minyak goreng jadi turun," ujarnya, Senin (17/1).

Menurutnya, untuk pendistribusian selanjutnya pun diserahkan ke kecamatan dan kelurahan. Sehingga, data sasaran penerima atau masyarakat yang berhak membeli minyak goreng murah ini dapat tepat sasaran.

Operasi pasar sendiri, sambung dia, digelar atas kerjasama PT Sinar Mas, Kementerian Perdagangan, dan Sudin PPKUKM. Untuk itu, sebanyak 3.000 liter minyak goreng murah disediakan dan dijual kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

Sementara itu, Safitri (45), salah satu warga Kampung Rawa, mengaku senang dengan adanya operasi pasar minyak goreng murah di wilayahnya.

"Bersyukur Alhamdulillah, karena setahu saya untuk harga minyak goreng di pasaran cukup tinggi. Saya dapat info dari kader PKK saya, dia yang kasih saya kupon juga karena katanya saya berhak buat dapat kupon minyak goreng murah," ucap Safitri.

Dikatakannya, dengan uang Rp30 ribu ia dapat membeli 2 liter minyak goreng murah, yang tentunya dapat memberikan sisa uang belanja yang cukup banyak untuk dibelikan barang kebutuhan yang lain.

"Harganya kalau di warung kan ada yang kisaran Rp23 ribu per liter, nah kalau ini kan 2 liter cuman Rp28 ribu. Alhamdulillah sekali kalau untuk warga seperti saya, sisa uangnya bisa buat beli yang lain kayak beras, mie instan, atau yang lainnya."

Namun kendati merasa senang, ia tetap mengeluhkan kuota yang diberikan untuk membeli minyak goreng murah yang digelar oleh Sudin PPKUKM Jakarta Pusat.

"2 liter sih sebenarnya kurang, apalagi sekarang udah mulai PTM. Jadi saya buat bekel untuk anak, kayak buat goreng telur, sosis, atau nugget cukup boros. Tapi ya mau gimana, dikasihnya cuman segini, paling nanti saya akalin disaring lagi," keluhnya. ● yan

4 Metropolis

IDN/ANTARA



OPERASI PASAR MINYAK GORENG

Warga membeli minyak goreng dengan harga murah saat operasi pasar di Johar Baru, Jakarta, Senin (17/1). Operasi pasar tersebut dilakukan untuk mengatasi kelangkaan minyak dan menstabilkan harga minyak goreng di pasaran.

Epidemiolog Prediksi Februari 2022 Puncak Kasus Omicron di Jakarta

Puncak kasus Omicron diprediksi akan terjadi dalam waktu dekat karena penularannya yang cepat. Terlebih lagi, orang yang terpapar Omicron mayoritas tidak mengalami gejala apa pun. Ini yang membuat ledakan cepat tanpa diketahui.

JAKARTA (IM) - Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budi-

man memprediksi, penyebaran kasus Covid-19 akibat varian Omicron di Jakarta akan terus

terjadi hingga beberapa waktu ke depan.

Menurut Dicky, puncak kasus Omicron di Ibu Kota diprediksi akan terjadi pada Februari 2022. "Ini Jakarta belum puncaknya. Kemungkinan Februari 2022 ini (puncak kasus Omicron) di Jakarta dan daerah luar Jakarta terutama luar Jawa paling lambat Maret 2022," kata Dicky saat dihubungi Senin (17/1).

Dicky mengatakan, puncak kasus Omicron diprediksi

akan terjadi dalam waktu dekat karena penularannya yang cepat. Terlebih lagi, orang yang terpapar Omicron mayoritas tidak mengalami gejala apa pun. "Sehingga ada dua aplikasi dari tidak gejala ini adalah pertama umumnya tidak terdeteksi. Kedua, ini yang membuat ledakan cepat tanpa diketahui," ucap Dicky.

Menurut Dicky, Pemprov DKI Jakarta harus mempercepat pelacakan kasus masyarakat yang terpapar Omicron. Sebab, kata Dicky, Jakarta merupakan indikator situasi paparan Covid-19 maupun varian baru dalam skala nasional.

"Ketika Jakarta buruk, Indonesia memburuk. Ketika Jakarta baik, Indonesia membaik. Bukan berarti penyebabnya itu Jakarta, tapi

indikator ini terjadi akibat Jakarta memiliki kapasitas paling memadai dan mumpuni menemukan atau mendeteksi kasus," pungkask Dicky.

Sebagaimana diketahui, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mendata ada 720 kasus Covid-19 yang terkonfirmasi varian Omicron. Dari jumlah tersebut, 21 persen atau sebanyak 153 merupakan penularan dari transmisi lokal atau penularan yang terjadi di wilayah DKI Jakarta. Sisanya, 78,8 persen atau 567 kasus dibawa oleh pelaku perjalanan luar negeri yang terkonfirmasi positif Covid-19 saat tiba di Indonesia.

Transmisi lokal Omicron yang sebelumnya sangat sedikit mulai merangkak naik menyanyi angka kasus Covid-19 varian Omicron dari penularan impor. ● yan

Apindo DKI Gugat Gubernur Anies Baswedan ke PTUN

JAKARTA (IM) - Dewan Pimpinan Provinsi DKI Jakarta Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO DKI) resmi menggugat Gubernur Anies Baswedan soal revisi UMP 2022. Dalam gugatannya, Apindo memohon majelis hakim PTUN Jakarta untuk menyatakan batal revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tersebut.

"Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021," demikian bunyi gugatan yang dikutip Tempo dari situs PTUN Jakarta, Senin (17/1).

Sebelumnya, Anies menerbitkan Keputusan 1571/2021 yang menyatakan bahwa UMP DKI 2022 naik menjadi 5,1 persen atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021. Dengan demikian, UMP Jakarta pada 2022 menjadi Rp 4.641.854.

Regulasi ini adalah revisi dari Keputusan Nomor 1395 tahun 2021. Keputusan ini menetapkan UMP 2022 hanya naik 0,85 persen atau Rp 37 ribu.

Apindo mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis, 13 Januari 2022. Gugatan ini registrasi dengan nomor perkara 11/G/2022/PTUN.JKT.

Selain menggugat Anies

membatalkan Keputusan 1517/2021, Apindo juga meminta mencabut aturan tersebut dan memberlakukan kembali Keputusan 1395/2021.

"Menyatakan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 19 November 2021 berlaku dan mengikat."

Wakil Ketua DPP Apindo DKI, Nurjaman mengatakan gugatan para pengusaha terhadap pemerintah DKI bukan bermaksud menyerang Gubernur Anies Baswedan. Dia menyatakan gugatan yang menyoal aturan kenaikan UMP dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum.

Nurjaman melihat ada ketidaksinkronan antara Keputusan 1517/2021 yang dikeluarkan Anies Baswedan dengan peraturan pemerintah pusat. Formulasi UMP dalam beleid itu dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

"Masalahnya adalah tidak ada ketegasan kepada dunia usaha. Jadi yang berpolemik ini bukan Apindo dan Pemprov DKI, tapi Pemprov DKI versus pemerintah pusat," ujar Nurjaman saat dihubungi, Minggu (16/1).

Hormati Gugatan Apindo
Pemprov DKI Jakarta menghormati gugatan seju-

lah pengusaha soal Keputusan DKI No 1517/2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 ke PTUN Jakarta. Dalam Keputusan tersebut UMP DKI mengalami kenaikan 5,1% atau menjadi Rp4.641.854. "Kami menghormati kalau ada beberapa pengusaha yang melakukan gugatan terkait UMP yang sudah ditetapkan Pemprov DKI," ungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Senin (17/1).

Politisi Partai Gerindra ini pun menjelaskan, Keputusan terkait dengan UMP 2022 sudah dipertimbangkan serta melalui proses panjang. Kepentingan Keputusan ini bukan saja untuk buruh melainkan untuk pengusaha dan masyarakat.

"Sekali lagi, Pak Gubernur, Pemprov DKI mengambil keputusan melalui proses panjang dengan berbagai pertimbangan evaluasi dan semuanya untuk kepentingan, tidak hanya kepentingan buruh, tapi juga kepentingan pengusaha, kepentingan masyarakat banyak dan khususnya bagi seluruh warga Jakarta," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Ariza memohon semua pihak, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) agar mematuhi aturan tentang kenaikan UMP Jakarta 2022 yang telah diputuskan sebelumnya. ● yan

Plt. Walkot Bekasi Dampingi Wagub Jabar Tinjau PTM di Kota Bekasi

FOTO : HUMAS PEMKOT BEKASI



Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto (tengah) bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum (kanan) meninjau pelaksanaan PTM di Kota Bekasi, Senin (17/1).

KOTA BEKASI (IM) - Plt Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Tri Adhianto Tjahjono menyambut kedatangan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum di SMA Negeri 1 Kota Bekasi, Senin (17/1).

Kedatangan orang nomor dua di Jawa Barat itu bertujuan untuk meninjau proses pembelajaran tatap muka (PTM) yang selama ini sudah berjalan.

Selain itu, UU juga menghadiri Pembinaan Kepala SMA/SMK negeri dan swasta se-Kota Bekasi di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Pak Uu, sapaan akrabnya, memberikan motivasi dan semangat kepada para siswa yang saat ini sudah belajar seperti biasa di mana siswa dapat bertemu langsung dengan gurunya.

"Tetap semangat dan mari raih prestasi, tentunya ini hal yang dinantikan oleh murid maupun guru. Belajar seperti biasa dan belajar dengan tatap muka. Meskipun begitu, kita harus saling menjaga protokol kesehatan, saling mengingatkan satu sama lain, dan jangan lengah," ucapnya dalam rilis Humas Pemkot Bekasi, Senin (17/1).

Kepada siswa, Uu mengatakan untuk selalu belajar dengan giat, disiplin, serta memiliki moral maupun etika dan akhlak yang baik terhadap teman maupun guru yang mengajar.

Ia juga berpesan, generasi muda perlu memiliki keahlian, yakni menguasai teknologi, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, membiasakan

diri berbagi tugas dengan berorganisasi, serta memperkuat organisasi.

"Menjadi pelajar yang memiliki kemauan untuk maju, harus giat, meningkatkan kedisiplinan moral dan etika, berakhlak baik. Generasi muda harus memiliki keahlian, dalam bidang teknologi, membiasakan diri dengan organisasi, perkuat keimanan dan ketakwaannya," tambahnya.

Uu bersama Tri melihat beberapa kelas yang sedang melakukan kegiatan PTM. Tampan para siswa sudah terbiasa menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dicek suhu saat masuk sekolah, serta dipasang penyekat di meja masing-masing siswa.

Selain itu, siswa diwajibkan membawa makanan dan minuman dari rumah demi mencegah terjadinya penularan. Sampai saat ini, sekolah masih belum membuka kantin.

Selaras dengan pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat, Tri mengapresiasi kedatangan wakil gubernur yang sudah memberikan motivasi kepada siswa di wilayahnya.

"Turut mengapresiasi kehadiran Pak Wagub (Jawa Barat) yang telah menyempatkan waktunya untuk datang ke Kota Bekasi melihat langsung kegiatan PTM di sekolah, memberikan motivasi dan menyapa langsung anak-anak," imbuhnya.

Sama seperti yang disampaikan Pak Wagub, sambung Tri, para guru dan murid harus saling kompak dalam menerapkan proses, saat kegiatan di sekolah maupun di luar setelah pulang sekolah," tutup Tri. ● mdl

Pimpin Apel Pagi, Plt Bupati Bekasi Ingatkan ASN Beri Pelayanan Maksimal

CIKARANG PUSAT (IM) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kembali menggelar kegiatan Apel Pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) perdana di tahun 2022.

Apel yang dipimpin oleh Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki, tersebut dilaksanakan di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (17/1). Apel ini diikuti oleh Pj. Sekretaris Daerah, Herman Hanapi, Kepala Perangkat Daerah, dan ASN di Lingkungan Pemkab Bekasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri Perencanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/342/M.KT.00/2021, tanggal 30 Desember 2021, tentang Himbauan Apel Pagi di Lingkungan Institusi Pemerintah.

Plt. Bupati dalam sambutannya, meminta kepada seluruh ASN agar kegiatan apel yang akan dilaksanakan secara rutin setiap minggu-



FOTO : DOK.PIM PROKOPIM SETDAKAB BEKASI

Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki (gambar atas, berdiri di podium) memimpin Apel Pagi ASN di lingkungannya yang berlangsung di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (17/1).

nya itu dijadikan semangat untuk meningkatkan motivasi dan kinerja, sehingga dapat selalu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

"Saya meminta para ASN di Pemkab Bekasi lebih meningkatkan motivasi dan kinerja untuk selalu memberikan pelayanan yang maksimal," tuturnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Senin (17/1).

Selain itu, ia mengingatkan untuk selalu mengimplementasikan core value sebagai ASN yang berAKHLAK dalam pekerjaannya sehari-hari, agar dapat meningkatkan budaya kerja yang profesional.

"Teruslah tingkatkan budaya kerja profesional, serta mengimplementasikan core value sebagai seorang ASN berAKHLAK, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif," tutupnya. ● mdl